

## **EVALUASI SISTEM PENJURUSAN SISWA SMU**

**Oleh:**  
**Sumadi**

### **Abstrak**

Penelitian evaluasi ini bertujuan untuk mengungkap masalah pelaksanaan penjurusan siswa SMU tahun ajaran 1996/1997, yang meliputi: (1) upaya sekolah dalam memenuhi data pribadi siswa untuk kepentingan penjurusan; (2) peran pelaksana dalam pelaksanaan penjurusan siswa; (3) peran Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan penjurusan siswa; (4) tingkat keabsahan proses penjurusan siswa; (5) kehandalan prestasi belajar dipakai sebagai salah satu dasar penjurusan siswa; (6) pencapaian prestasi belajar siswa setelah penjurusan; (7) tingkat kepuasan siswa terhadap hasil penjurusan; dan (8) keefektifan proses pelaksanaan penjurusan siswa SMU tahun ajaran 1996/1997.

Hasil evaluasi pelaksanaan penjurusan siswa SMU tahun ajaran 1996/1997 menunjukkan, bahwa: (1) upaya sekolah dalam memenuhi data pribadi siswa untuk kepentingan penjurusan dalam kategori cukup baik; (2) peran pelaksana penjurusan dalam kategori baik; (3) peran Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab penjurusan dalam kategori cukup baik; (4) proses pelaksanaan penjurusan dalam kategori cukup baik; (5) prestasi belajar siswa termasuk handal dipakai sebagai salah satu dasar penjurusan; sumbangan efektif prestasi belajar siswa sebagai prediktor penjurusan sebesar 23,65%; (6) prestasi belajar siswa setelah penjurusan ternyata lebih baik dari pada sebelum penjurusan; (7) sebagian besar siswa (92%) merasa minimal cukup puas terhadap hasil penjurusan; dan (8) keefektifan proses pelaksanaan penjurusan siswa SMU tahun ajaran 1996/1997 berhasil secara efektif.

Meskipun pelaksanaan penjurusan siswa SMU tahun ajaran 1996/1997 berhasil secara efektif, namun dalam hal tertentu masih perlu upaya peningkatan dari semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan penjurusan terutama dalam komponen/sub-komponen yang belum mencapai kategori baik. Prestasi belajar siswa sebagai prediktor penjurusan meskipun sudah dianggap handal, namun sumbangan efektifnya baru 23,65%. Jadi, untuk meningkatkan kehandalan prediktor penjurusan, perlu menggunakan sumber data siswa khususnya tes bakat dan tes minat dan SMU tidak hanya terpusat pada tradisi mengandalkan data dari tes hasil belajar siswa saja. Di samping itu, dalam menempatkan siswa ke jurusan tertentu diusahakan sesuai dengan kecenderungan kemampuan siswa, serta menghindari sistem kuota.

## **Pendahuluan**

Keberhasilan proses belajar mengajar akan lebih optimal jika sesuai dengan kondisi individu siswa, sebab bila tidak sesuai justru dapat menjadi kendala. Oleh karena itu, pihak yang berkompeten harus mengusahakan agar dalam proses belajar mengajar menyesuaikan dengan kondisi individu siswa. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, yang berbunyi: "siswa mempunyai hak mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya".

Penyelenggaraan program khusus di kelas tiga SMU dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dalam bidang akademik atau pendidikan profesional, dan mempersiapkan siswa secara langsung atau tidak langsung untuk bekerja di masyarakat (Depdikbud, 1993). Dengan demikian, penyelenggaraan program khusus merupakan upaya strategis dalam memberikan fasilitas kepada siswa untuk menyalurkan bakat, minat, dan kemampuan yang dimilikinya yang dianggap paling potensial untuk dikembangkan secara optimal. Oleh karena itu, maka tugas sekolah/guru/petugas BP harus mampu menempatkan pilihan jurusan ke dalam program khusus secara tepat kepada masing-masing siswa.

Menempatkan siswa pada program khusus secara tepat berarti memberikan peluang kepada siswa untuk dapat berhasil pada masa yang akan datang. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, bahwa "peserta didik berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan dirinya dengan belajar pada setiap saat dalam perjalanan hidupnya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing". Namun sebaliknya, salah pilih jurusan dapat menimbulkan akibat negatif yang berkelanjutan (Suyono Wiryoatmojo, 1986), baik bagi siswa yang dijuruskan maupun negara yang memberikan subsidi. Akibat negatif tersebut dapat berupa kerugian finansial (uang), waktu, maupun kerugian untuk memperoleh kesempatan yang lebih baik.

Upaya menghindarkan kemungkinan terjadi ketidaktepatan penjurusan siswa SMU dalam pilihan program khusus tertentu, perlu suatu upaya antara lain melalui kegiatan pengukuran dan penilaian tentang keefektifan perencanaan penjurusan, keefektifan pelaksanaan penjurusan, keberhasilan

an siswa setelah penjurusan, serta kendala-kendalanya yang dihadapi dalam penjurusan. Agar kegiatan pengukuran dan penilaian akurat, maka perlu didukung oleh informasi yang menyeluruh. Informasi yang menyeluruh memberi indikasi bahwa untuk menentukan pilihan jurusan seseorang siswa didasarkan oleh beberapa sumber informasi, seperti: hasil tes bakat, hasil tes minat, prestasi belajar, ataupun masukan dari pihak-pihak yang terkait.

Mempergunakan prestasi belajar sebagai pedoman utama dalam penjurusan siswa dapat menimbulkan tindakan spekulatif, seperti: pembentukan kelas utama yang bertujuan memacu kemampuan kognitif, mengutamakan salah satu program yang dimaksudkan untuk memenuhi kuota kelas sehingga mengabaikan program lainnya, atau memandang lebih tinggi atau lebih rendah terhadap sesuatu program khusus. Hal-hal tersebut menunjukkan adanya program kegiatan belajar mengajar yang kurang berakar pada pribadi individu (Suyono Wiryoatmojo, 1986).

Mendasarkan data prestasi belajar siswa untuk keperluan penjurusan siswa SMU, dapat menimbulkan tindakan spekulatif, yang dapat menyebabkan hasil penjurusan menjadi tidak akurat. Hasil penjurusan yang tidak akurat berarti menempatkan siswa ke dalam program khusus juga tidak tepat. Dampak yang terjadi, siswa belajar tidak sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, sehingga hasil belajar siswa menjadi tidak optimal.

Secara sistemik, berhasil atau tidaknya pelaksanaan penjurusan siswa di SMU dapat disebabkan oleh berbagai persyaratan tiap komponen yang mempengaruhinya. Terpenuhi atau tidaknya komponen-komponen tersebut akan mempengaruhi efektif atau tidaknya pelaksanaan penjurusan siswa. Mengetahui keefektifan dan efisiensi pelaksanaan penjurusan siswa di SMU, perlu dikaji secara mendalam. Untuk itu, diperlukan informasi tentang perencanaan, pelaksanaan, hasil, dan dampak dari kegiatan penjurusan tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh memungkinkan bagi pihak-pihak terkait mengambil berbagai alternatif kebijakan.

## **Pembahasan**

Pembahasan terhadap hasil evaluasi dilakukan pada masing-masing komponen dan subkomponen yang dievaluasi. Berdasarkan hasil analisis diharapkan dapat memperoleh temuan yang diperlukan sebagai dasar

memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan penjurusan dalam mengambil kebijakan.

Pelaksanaan penjurusan siswa pada dasarnya merupakan suatu proses, yang secara sistemik mencakup komponen masukan, komponen proses, dan komponen hasil. Berkenaan dengan kegiatan evaluasi ini, hasil wawancara dan pengamatan dengan berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan penjurusan siswa SMU tahun ajaran 1996/1997 disajikan, sebagai berikut:

**a. Data Pribadi Siswa**

Data pribadi siswa yang seharusnya dikumpulkan oleh sekolah sebagai dasar penjurusan yaitu data hasil tes bakat, hasil tes/angket minat, hasil prestasi belajar, dan angket dari keluarga yang berisi informasi tentang kecenderungan bakat, prestasi, maupun minat siswa. Dari data-data pribadi yang dikumpulkan, selanjutnya dibuat profil kecenderungan bakat, kecenderungan minat, dan kecenderungan prestasi belajar. Sedangkan angket dari keluarga siswa dipakai untuk memperkuat informasi tentang profil kecenderungan bakat, minat, dan prestasi belajar siswa. Urutan tingkat kepentingannya: (1) kecenderungan bakat, (2) kecenderungan minat, (3) kecenderungan prestasi belajar, dan (4) terakhir informasi keluarga siswa.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan ternyata bahwa sebagian SMU telah melakukan tes psikologik untuk mengetahui kecenderungan bakat siswa. Berdasarkan hasil tes psikologik tersebut kemudian dibuat profil kecenderungan bakat siswa. Namun, SMU biasanya hanya mampu melaksanakan tes psikologik satu kali saja, dan sangat jarang yang melakukannya lebih dari satu kali. Hal ini menandakan belum ada upaya optimal dari SMU melakukan tes psikologik untuk mengenal bakat siswa secara akurat. Sebab, untuk mengenal bakat secara akurat perlu tes bakat secara berulang-ulang dengan alat tes yang berbeda-beda.

Tes minat, jarang digunakan SMU untuk mengetahui kecenderungan minat siswa. Untuk mengetahui minat siswa, umumnya SMU memberikan angket. Dari angket tersebut kemudian dianalisis untuk dibuat profil kecenderungan minatnya. Namun sebagian sekolah ada pula yang untuk mengetahui minat siswa hanya dengan menyuruh siswa menuliskan pilihan

jurusan yang diinginkan. Dengan kondisi yang demikian, nampak bahwa minat-minat siswa belum teruji apakah profil kecenderungan minat yang dibuat sekolah benar-benar merupakan minat siswa yang sesungguhnya.

Belum optimalnya upaya penyelenggaraan tes bakat dan tes minat sebagian besar terhambat oleh keterbatasan biaya. Untuk menyelenggarakan tes psikologik saja biaya ditanggung oleh siswa (keluarga siswa), sehingga bila penyelenggaraan semakin banyak, biaya yang ditanggung siswa juga semakin besar. Minimnya penyelenggaraan tes bakat dan tes minat tersebut menyebabkan kepercayaan terhadap data tersebut menjadi rendah. Akibatnya, pelaksana penjurusan kurang atau sedikit sekali memanfaatkan data hasil tes bakat/minat sebagai dasar penjurusan.

Angket keluarga siswa yang menginformasikan kecenderungan bakat dan minat siswa, jarang dilakukan SMU. Padahal, informasi tersebut dibutuhkan untuk kepentingan penjurusan siswa, sebab keluarga merupakan lingkungan yang relatif waktunya paling lama dalam mengenal kepribadian siswa. Masukan dari keluarga tersebut sangat membantu menentukan kecenderungan kemampuan siswa.

Prestasi belajar siswa, merupakan data pribadi siswa yang diperoleh dari hasil tes pada catur wulan tertentu. Sebagian besar SMU memanfaatkan hasil belajar siswa dari hasil ulangan umum catur wulan ketiga di kelas dua sebagai dasar penjurusan siswa. Sebagai sumber data pribadi yang dianggap paling dominan sebagai dasar penjurusan dibanding data pribadi yang lain, jumlah hasil ulangan yang dipakai sebagai dasar penjurusan seharusnya perlu ditambah sumbernya, sehingga lebih akurat.

#### **b. Pelaksana Penjurusan**

Pelaksana penjurusan siswa SMU adalah guru BP. Ada bermacam-macam tugas yang harus dilakukan oleh guru BP berkenaan dengan pelaksanaan penjurusan siswa. Berkaitan dengan evaluasi ini, tugas-tugas pelaksana dijabarkan dari Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling (Depdikbud, 1994), meliputi: (1) membuat program kerja penjurusan, (2) memberikan informasi segala aspek dan prospek jurusan yang ada di SMU kepada siswa, (3) memberikan informasi untuk membantu pemahaman diri siswa tentang kelebihan dan kelemahannya, (4) memberikan informasi tentang pindah jurusan, (5) memberi masukan kepada sekolah dalam

## *Evaluasi Sistem Penjurusan Siswa SMU*

penetapan jenis program khusus (jurusan), (6) mengumpulkan data pribadi siswa, (7) menempatkan jurusan siswa, (8) membuat laporan hasil kerja penjurusan, dan (9) mendokumentasikan hasil kerja penjurusan.

Berdasarkan hasil evaluasi, menunjukkan bahwa sebagian besar pelaksana tidak membuat program kerja penjurusan tersendiri, namun program tersebut tergabung dengan program BP secara keseluruhan. Padahal, seharusnya program kerja penjurusan dibuat tersendiri, sehingga tugas-tugas dapat terinci dengan jelas dan pelaksanaannya dapat terkendali. Di samping itu, pelaksana dapat mengevaluasi pelaksanaan penjurusan yang dilakukannya apakah sudah berhasil atau belum, atau dapat diketahui bagian-bagian mana yang sudah berjalan dengan baik dan yang belum baik. Hasil evaluasi diri tersebut diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan penjurusan pada masa-masa mendatang.

Tugas pelaksana memberikan informasi tentang aspek dan prospek jurusan, informasi pemahaman diri siswa, informasi pindah jurusan, sebagian besar diberikan oleh pelaksana dalam kerangka informasi bimbingan karier. Sebab, oleh pelaksana masalah tersebut dipandang berkaitan dengan karier siswa baik menyangkut pendidikan lanjut maupun jenis jabatan/pekerjaan yang dianggap tepat pada masa mendatang.

Tugas pelaksana dalam memberi masukan jenis program khusus (jurusan) kepada sekolah umumnya telah dilaksanakan, hanya saja antara sekolah yang satu dengan yang lain mempunyai dasar yang berbeda-beda. Seperti: sebagian besar SMU Negeri di Kotamadia Yogyakarta hanya menetapkan dua jurusan saja yaitu IPA dan IPS. SMU Negeri di Kabupaten Sleman dan SMU swasta yang jumlah siswanya banyak menetapkan tiga jurusan (IPA, IPS, dan bahasa). Sedangkan SMU swasta yang jumlah siswanya sedikit biasanya hanya menetapkan satu atau dua jurusan saja (biasanya IPA dan/atau IPS).

Tugas pelaksana dalam mengumpulkan data pribadi siswa seharusnya diperoleh data secara lengkap, baik jenis maupun jumlahnya, sehingga sumber data pribadi tersebut bisa menjadi dasar yang tepat dan akurat dalam menempatkan siswa ke dalam jurusan tertentu. Jenis data yang diperoleh seharusnya adalah data pribadi siswa yang meliputi: hasil tes bakat, tes/ angket minat, prestasi belajar, dan angket keluarga. Dari data-

data yang seharusnya ada, hanya angket keluarga yang jarang dilakukan oleh pelaksana. Namun, ternyata hasil tes bakat dan tes/angket minat yang telah dikumpulkan pelaksana jumlahnya masih terbatas, sehingga belum begitu difungsikan dalam penjurusan siswa. Oleh karena itu, prestasi belajar siswa yang banyak berfungsi sebagai dasar penjurusan siswa.

Dalam menempatkan jurusan seharusnya dilakukan oleh guru BP, karena menurut mekanisme kerja tugas pelayanan penempatan siswa ke dalam jurusan tertentu menjadi tugas guru BP. Dari 15 SMU yang dijadikan sampel dalam evaluasi ini, sebagian besar SMU proses penjurusannya dilakukan oleh wali kelas. Hal tersebut dilakukan bersama-sama dengan tugas menentukan kenaikan kelas siswa dari kelas dua ke kelas tiga. Padahal sesuai dengan mekanisme kerja, tugas wali kelas berkenaan dengan penjurusan hanya menyediakan daftar nilai, mengkoordinasi pemberian angket minat siswa dan angket orangtua. Tugas guru BP, membuat profil kecenderungan siswa dalam hal bakat, minat, prestasi belajar, dan angket orangtua. Berdasarkan profil kecenderungan tersebut guru BP dapat menempatkan jurusan siswa secara tepat.

Berdasarkan hasil evaluasi, ternyata dari 15 SMU yang dijadikan sampel hanya satu SMU yang proses penjurusannya dilakukan secara penuh oleh guru BP. Guru BP mulai memproses sumber data pribadi siswa pada saat siswa akan naik ke kelas dua SMU dengan maksud membuat kelompok-kelompok kelas sebagai bayangan pengelompokan berdasarkan jurusan-jurusan yang ada di kelas tiga. Dengan cara demikian, diharapkan bakat dan kemampuan siswa dalam satu kelas relatif homogen, sehingga pada saatnya dilakukan penjurusan secara formal di kelas tiga bisa lebih mantap dan dapat mengurangi ketidak-tepatan penempatan siswa serta meminimalkan kemungkinan pindah jurusan.

Tugas pelaksana dalam membuat laporan hasil kerja penjurusan seharusnya dibuat dalam bentuk laporan pelaksanaan program kerja. Ternyata, sebagian besar pelaksana tidak membuat dalam bentuk laporan hasil pelaksanaan program kerja, tetapi dalam bentuk laporan hasil penempatan jurusan siswa saja. Hal ini terjadi karena sebagian pelaksana tidak membuat program kerja penjurusan secara khusus, hanya disatukan dengan program umum BP.

Tugas pelaksana dalam mendokumentasikan hasil penjurusan, ternyata sebagian besar pelaksana sudah mendokumentasikannya termasuk dokumentasi sumber data pribadi siswa.

**c. Penanggung Jawab Penjurusan**

Penanggungjawab penjurusan siswa SMU yang dimaksudkan dalam evaluasi ini adalah Kepala Sekolah. Tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Kepala Sekolah berkenaan dengan pelaksanaan penjurusan, dijabarkan dari Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling (Depdikbud, 1994), meliputi: (1) mengkoordinasi pelaksanaan penjurusan, (2) menyediakan sarana yang diperlukan dalam penjurusan, dan (3) melakukan pembinaan baik dalam perencanaan program maupun dalam pelaksanaan penjurusan siswa.

Tugas Kepala Sekolah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan penjurusan sebaiknya dibentuk dalam suatu kepanitiaan yang dikuatkan dengan surat keputusan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penjurusan sebagian besar Kepala Sekolah telah melakukan koordinasi kepada beberapa pihak yang terkait dengan penjurusan siswa khususnya guru BP dan wali kelas. Namun, sebagian besar tidak dalam bentuk panitia yang dikuatkan dengan surat keputusan, karena penjurusan siswa sudah dianggap tugas rutin dari guru BP dan wali kelas.

Tugas Kepala Sekolah dalam menyediakan sarana yang diperlukan dalam penjurusan seperti ruangan, meja, kursi, alat-alat tulis, alat hitung, sebagian besar sudah terpenuhi, dalam pengertian sarana yang disediakan relatif sudah memenuhi syarat dalam pelaksanaan penjurusan. Sedangkan tugas melakukan pembinaan dalam perencanaan program kerja penjurusan, oleh karena sebagian besar guru BP tidak membuat program kerja penjurusan secara khusus, maka tugas tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sedang tugas Kepala Sekolah dalam membina pelaksanaan penjurusan, yaitu mengawasi, mengevaluasi, dan membantu kesulitan pelaksanaan penjurusan, nampaknya sudah dilakukan dengan baik.



#### **d. Proses Pelaksanaan Penjurusan**

Proses pelaksanaan penjurusan merupakan kejadian di mana berbagai sumber data pribadi siswa, pelaksana, dan penanggung jawab berinteraksi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Sumber data pribadi siswa dikumpulkan dan diolah oleh pelaksana, penanggung jawab mengkoordinasi, mengawasi, mengevaluasi, dan membantu bila terjadi kesulitan dalam pelaksanaan penjurusan.

Langkah-langkah yang dilalui dalam proses penjurusan yaitu (1) mengidentifikasi siswa atas dasar sumber data pribadi siswa untuk menentukan kecenderungan bakat, minat, dan prestasi belajarnya, (2) menyeleksi dan menempatkan siswa ke jurusan tertentu yang dianggap tepat atas dasar kecenderungan bakat, minat, dan prestasi belajarnya. Dalam menyeleksi dan menempatkan siswa seharusnya dasar utamanya adalah bakat siswa, baru kemudian dipertimbangkan minat dan prestasi belajarnya.

Berkenaan dengan upaya mengidentifikasi kecenderungan bakat, minat, dan prestasi belajar siswa, ternyata sebagian besar SMU sudah melakukan identifikasi. Hasil identifikasi dituangkan dalam bentuk profil. Jadi ada profil kecenderungan bakat, profil kecenderungan minat, dan profil kecenderungan prestasi belajar.

Tahap berikutnya yaitu menyeleksi sekaligus menempatkan siswa ke jurusan tertentu. Dalam menyeleksi dan menempatkan siswa ke jurusan tertentu, seharusnya didasarkan dari profil kecenderungan bakat, minat, dan prestasi belajar. Namun dalam pelaksanaannya masih terpusat penggunaannya pada prestasi belajar siswa. Sedangkan, data kecenderungan bakat dan minat masih menjadi data pelengkap, sehingga data tersebut jarang dimanfaatkan.

Upaya menempatkan siswa ke jurusan tertentu seharusnya ditetapkan berdasarkan kecenderungan kemampuan siswa. Namun yang terjadi, sebagian besar SMU menempatkan jurusan siswa dengan cara menetapkan kuota untuk masing-masing jurusan. Biasanya alternatif pertama yang harus dipenuhi adalah program IPA, kemudian program IPS, dan terakhir program bahasa. Jadi, kegiatan yang pertama adalah memilih siswa yang memenuhi syarat untuk dimasukkan ke program IPA. Jika jumlah siswa untuk program IPA sudah terpenuhi, selanjutnya memilih siswa untuk

dimasukkan ke program IPS. Sedangkan program bahasa biasanya diperuntukkan bagi siswa yang tidak memenuhi syarat masuk program IPA dan IPS. Di samping itu sering terjadi, ada siswa yang tidak mau ditempatkan ke program IPA tetapi ingin masuk ke program IPS atau program bahasa, atau tidak mau ke program IPS dan memilih program bahasa padahal siswa yang bersangkutan memenuhi syarat masuk program yang ditetapkan sekolah.

Penempatan jurusan siswa dengan cara kuota memang dapat terjadi karena petunjuk pelaksanaan kurikulum SMU tahun 1994 memungkinkan hal tersebut diterapkan. Sebab, sistem penjurusan yang ditetapkan masih sangat fleksibel. Hal itu nampak dari persyaratan untuk dapat memasuki suatu program khusus (jurusan) di kelas tiga. Untuk bisa memasuki program IPA, siswa harus memenuhi syarat naik kelas dari kelas dua ke kelas tiga serta maksimal hanya ada satu nilai kurang ( $1K = 6-1$ ) pada mata pelajaran fisika, biologi, kimia, dan matematika. Untuk memasuki program IPS, siswa harus memenuhi syarat naik kelas dari kelas dua ke kelas tiga serta maksimal hanya ada satu nilai kurang ( $1K$ ) pada mata pelajaran sejarah nasional dan sejarah umum, ekonomi, sosiologi, dan geografi. Sedang untuk memasuki program bahasa, siswa harus memenuhi syarat naik kelas dari kelas dua ke kelas tiga serta maksimal hanya ada satu nilai kurang ( $1K$ ) pada mata pelajaran bahasa dan sastra indonesia, bahasa inggris, dan sejarah nasional dan sejarah umum.

Penempatan jurusan dengan cara kuota memang nampak praktis dan fleksibel pelaksanaannya. Namun, memberi peluang mengesampingkan kecenderungan kemampuan siswa, sehingga program belajar mengajar selanjutnya menjadi kurang berakar pada pribadi individu siswa.

#### e. Prestasi belajar siswa setelah penjurusan

Berdasarkan hasil pengujian, ternyata bahwa prestasi belajar siswa sesudah penjurusan dengan sebelum penjurusan menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan koefisien  $t = -2,88$  pada taraf signifikansi 0,004 untuk uji dua ekor ( $p < 0,05$ ). Rerata (*mean*) prestasi belajar siswa sesudah penjurusan sebesar 20,05 lebih besar dari pada rerata prestasi belajar siswa sebelum penjurusan sebesar 19,92. Hal ini berarti, bahwa prestasi

belajar siswa sesudah penjurusan ternyata lebih baik dibandingkan sebelum penjurusan.

**f. Keandalan prestasi belajar dipakai sebagai dasar penjurusan**

Pengujian selanjutnya, menunjukkan terdapat korelasi positif antara prediktor penjurusan dengan kriterium. Hal tersebut ditunjukkan oleh koefisien korelasi positif sebesar 0,4863 pada taraf signifikansi 0,001 ( $p < 0,01$ ). Dengan demikian, maka prestasi belajar siswa merupakan salah satu prediktor yang handal dipakai sebagai salah satu dasar penjurusan siswa SMU tahun ajaran 1996/1997.

**g. Kepuasan Siswa terhadap Hasil Penjurusan**

Berdasarkan analisis deskriptif diketahui bahwa secara umum tingkat kepuasan siswa SMU tahun ajaran 1996/1997 terhadap hasil penjurusan menunjukkan cukup puas. Data tabulasi menunjukkan bahwa 37% ada dalam kategori puas, 55% ada dalam kategori cukup puas, 2% ada dalam kategori kurang puas, dan 6% ada dalam kategori tidak puas. Dengan demikian, tingkat kepuasan siswa terhadap hasil penjurusan terdapat 92% siswa minimal cukup puas (ada dalam kategori puas dan cukup puas).

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap keandalan prestasi belajar dipakai sebagai prediktor penjurusan, prestasi belajar siswa sesudah penjurusan, dan tingkat kepuasan siswa terhadap hasil penjurusan, maka keefektifan proses pelaksanaan penjurusan siswa SMU tahun ajaran 1996/1997 dapat diketahui sesuai dengan persyaratan dan kriteria penilaiannya.

Adapun persyaratan yang diperlukan untuk menentukan keefektifan proses pelaksanaan penjurusan siswa SMU tahun ajaran 1996/1997, meliputi:

- (1) prestasi belajar siswa merupakan prediktor yang handal sebagai salah satu dasar penjurusan;
- (2) prestasi belajar siswa setelah penjurusan lebih baik dari pada sebelum penjurusan;
- (3) tingkat kepuasan siswa terhadap hasil penjurusan sebagian besar menunjukkan minimal cukup puas.

Sedangkan kriteria penilaian untuk menentukan keefektifan proses pelaksanaan penjurusan, adalah:

- (1) jika ketiga persyaratan terpenuhi, maka proses pelaksanaan penjurusan siswa dianggap efektif.
- (2) jika terpenuhi dua di antara tiga persyaratan, maka proses pelaksanaan penjurusan dianggap cukup efektif.
- (3) jika terpenuhi satu di antara tiga persyaratan, maka proses pelaksanaan penjurusan dianggap kurang efektif.
- (4) jika ketiga persyaratan tidak terpenuhi, maka proses pelaksanaan penjurusan dianggap tidak efektif.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan, bahwa:

- (1) prestasi belajar siswa merupakan prediktor yang handal sebagai salah satu dasar penjurusan;
- (2) prestasi belajar siswa setelah penjurusan lebih baik dari pada sebelum penjurusan; dan
- (3) tingkat kepuasan siswa terhadap hasil penjurusan sebagian besar menunjukkan minimal cukup puas.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa, ternyata ketiga persyaratan yang diperlukan untuk menentukan keefektifan proses pelaksanaan penjurusan terpenuhi. Jadi, proses pelaksanaan penjurusan siswa SMU tahun ajaran 1996/1997 dinyatakan berhasil secara efektif.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan. Penarikan kesimpulan mengacu pada permasalahan rancangan evaluasi. Kesimpulan dalam evaluasi ini adalah, sebagai berikut:

1. Upaya SMU dalam memenuhi data pribadi siswa untuk kepentingan penjurusan dalam kategori kurang baik. Kekurangan-kekurangan yang perlu ditingkatkan adalah dalam penyediaan profil kecenderungan bakat, minat, dan prestasi belajar siswa; jumlah tes bakat, tes minat, hasil tes prestasi belajar, dan angket keluarga siswa.
2. Peran pelaksana penjurusan siswa SMU tahun ajaran 1996/1997 ada dalam kategori baik. Kekurangan-kekurangan yang masih perlu diting-

katkan terutama dalam pemberian informasi kepada siswa tentang kecenderungan bakat dan minat, kesempatan pindah jurusan termasuk akibat positif dan negatifnya; penyusunan program kerja, pembuatan laporan hasil kerja, dan pendokumentasian data penjurusan.

3. Peran Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab pelaksanaan penjurusan siswa SMU tahun ajaran 1996/1997 dalam kategori cukup baik. Kekurangan-kekurangan yang perlu ditingkatkan adalah dalam pembentukan kepanitiaan dan pembuatan Surat Keputusan Kepanitiaan penjurusan.
4. Proses pelaksanaan penjurusan siswa SMU tahun ajaran 1996/1997 dalam kategori cukup baik. Kekurangan-kekurangan yang masih perlu ditingkatkan yaitu dalam prosedur pemilihan jurusan, kerja sama, ketepatan menyelesaikan tugas penjurusan, dan terutama penggunaan sumber data pribadi siswa dalam penetapan jurusan siswa yang masih terpusat pada penggunaan hasil tes prestasi belajar.
5. Hasil uji korelasi antara prediktor penjurusan (prestasi belajar siswa Cawu 3 kelas II) dengan kriterium (NEM) terdapat korelasi positif ( $r = 0,49$ ,  $p < 0,01$ ). Dengan demikian, prestasi belajar siswa handal dipakai sebagai salah satu dasar penjurusan siswa SMU tahun ajaran 1996/1997.
6. Hasil pengujian menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa sesudah penjurusan lebih baik daripada prestasi belajar siswa sebelum penjurusan. Hal tersebut berdasarkan hasil analisis data yang menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara rerata prestasi belajar siswa setelah penjurusan (rerata = 20,05) dengan rerata prestasi belajar siswa sebelum penjurusan (rerata = 19,92). Koefisien  $t = -2,88$  ( $p < 0,01$ ).
7. Tingkat kepuasan siswa terhadap hasil penjurusan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa minimal cukup puas. Data tabulasi menunjukkan bahwa 37% ada dalam kategori puas dan 55% ada dalam kategori cukup puas, atau terdapat 92% siswa dalam kategori minimal cukup puas. Artinya, sebagian besar siswa kelas tiga SMU tahun ajaran 1996/1997 dapat menerima keputusan penempatan jurusan ke dalam program khusus yang disediakan oleh sekolah. Sedangkan sebagian siswa yang tidak menerima keputusan atau tidak puas atas penempatan

## *Evaluasi Sistem Penjurusan Siswa SMU*

jurusan disebabkan siswa belum memahami dan menyadari benar kelebihan dan kekurangan kemampuannya.

8. Pelaksanaan penjurusan siswa SMU tahun ajaran 1996/1997 berhasil secara efektif.

### **Daftar Pustaka**

Depdikbud (1993). *Kurikulum Sekolah Menengah Umum*. Landasan, program, dan pengembangan. Jakarta: Depdikbud RI.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang *Pendidikan Menengah*.

Suyono Wiryoatmojo (1986). *Pengaruh Jenis Aspirasi, Sikap Ilmiah, dan Intelligensi pada Hasil Belajar Murid SMA kelas I di enam Kotamadya di Jawa Tengah dalam Mata Pelajaran Kimia*. Bandung: Disertasi.

Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.